

1. Menurut Keputusan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perindustrian Nomor 881 Tahun 2024 Tentang Daftar Informasi Dikecualikan Di Lingkungan Kementerian Perindustrian, data yang tidak dapat diberikan secara bebas mencakup:
  - a. Data pengaduan industri/Masyarakat (Identitas pelapor, isi laporan, bukti)
  - b. Data evaluasi/pengawasan industri (Hasil audit, temuan, rekomendasi)
  - c. Data pelaku usaha industri (Nama, alamat, identitas usaha)
  - d. Data tenaga kerja industri (Data pekerja dan kompetensi)
  - e. Data peserta pelatihan (Nama peserta dan hasil pelatihan)
  - f. Data Sertifikasi Industri (Sertifikasi kompetensi)
  - g. Hasil Pembinaan Industri (Hasil monitoring & evaluasi)
  - h. Data kerja sama/kemitraan industri (Relasi bisnis dan nilai Investasi)
  
2. Menurut Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1492 Tahun 2025 Tentang Daftar Informasi Dikecualikan Di Lingkungan Kementerian Perrdagangan, data yang tidak dapat diberikan secara bebas mencakup:
  - a. Data Pengaduan Konsumen (Data identitas pelapor serta laporan)
  - b. Kegiatan Perdagangan Antar Pulau (Kegiatan dan pelaku distribusi)
  - c. Nama dan Alamat dari Pelaku Usaha
  - d. Kegiatan Distributor / Distribusi Barang (Jaringan Distribusi)
  - e. Kegiatan Perizinan Berusaha (Dokumen Izin)
  - f. Aktivitas Ekspor / Impor
  - g. Relasi bisnis, *Buyer*, Mitra Dagang
  
3. Menurut Peraturan Menteri Koperasi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Satu Data Koperasi, data yang tidak dapat diberikan secara bebas mencakup:
  - a. Data anggota koperasi (Nama, Alamat, identitas)
  - b. Data transaksi koperasi
  - c. Data modal koperasi
  - d. Data SHU koperasi
  - e. Data volume usaha koperasi
  - f. Data pembinaan koperasi
  - g. Data pengawasan koperasi
  - h. Data sarana dan prasarana koperasi
  
4. Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Basis Data Tunggal, data yang tidak dapat diberikan secara bebas mencakup:
  - a. Data identitas pelaku usaha UKM

- b. Data identitas tenaga kerja UKM
- c. Data transaksi usaha UKM
- d. Data relasi usaha UKM
- e. Data kinerja usaha UKM
- f. Data pembinaan UKM
- g. Data pengawasan UKM